

**PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM
KOORDINASI KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING
DI KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Maulana Alfansuri

NPP. 29.1086

Asdaf Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: maulanaalfansuri@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The lack of coordination and synchronization between Regional Apparatus Organizations makes the stunting rate in Gunung Mas Regency still high. This is a challenge for local governments to collaborate and coordinate with each other in the acceleration of stunting reduction so that the stunting rate will decrease to 14% in 2024 according to the President's order in Presidential Decree number 72 of 2021 regarding the acceleration of stunting reduction. Stunting prevention is carried out in order to improve the quality of human resources. healthy, fit and smart. So that in the implementation of the program, all related components synergize and collaborate with each other, especially Bappeda has a role as a leading sector (sector leader) capable of coordinating all components to be able to carry out their duties optimally.* **Purpose:** *This study aims to determine and analyze the role of Bappeda in coordinating convergence in preventing stunting in Gunung Mas Regency, Central Kalimantan Province, along with the inhibiting factors and efforts to overcome the inhibiting factors.* **Method:** *The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The technique used in data collection is through observation, interviews and documentation, and the researcher uses the theoretical approach of Soekanto Soerjono (2012:212) with dimensions consisting of rights and obligations. The informants in this study amounted to 10 people consisting of the head of the institution to the community.* **Result:** *The results of this study indicate that: (1) the role of Bappeda in coordinating the convergence of stunting prevention in Gunung Mas Regency has been carried out well but is still not optimal in terms of the effect of coordination (2) inhibiting factors in the role of Bappeda in coordinating the convergence of stunting prevention in Gunung Mas Regency. is the lack of coordination between opd and the refocusing due to the covid-19 pandemic (3) the efforts that have been made (1) Establishing Stunting Interventions in the KPI Changes in the 2021 RPJMD, (2) Providing the Socialization of Implementation Guidelines.* **Conclusion:** *As for the implementation that has been running but is not yet optimal because there are inhibiting factors and there are efforts being made to overcome the inhibiting factors, namely the suggestions given, namely (1) Increasing the Absorption of the available Budget, (2) Increasing Supervision of the Implementation of coordination between OPDs, (3) Improving the Quality of Executors of the Implementation of Activities*

Keywords: *Role, Coordination, Leading Sector*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masih lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antar Organisasi Perangkat Daerah membuat angka Stunting di Kabupaten Gunung Mas masih tinggi, ini menjadi tantangan pemerintah daerah untuk saling berkolaborasi dan berkoordinasi dalam konvergensi percepatan penurunan stunting sehingga tingkat Stunting menurun hingga 14% di tahun 2024 sesuai perintah Presiden pada Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting, sehingga dalam pelaksanaan program tersebut seluruh komponen terkait saling bersinergitas dan berkolaborasi. Bappeda memiliki peranan sebagai leading sector (sektor pemimpin) mampu mengkoordinir seluruh komponen untuk mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisa sejauh mana peranan Bappeda dalam koordinasi konvergensi dalam pencegahan Stunting di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, beserta faktor penghambatnya serta upaya mengatasi faktor penghambat. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yakni melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dan peneliti menggunakan pendekatan teori soekanto soerjono (2012:212) dengan dimensi yang terdiri hak dan kewajiban. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari pimpinan instansi hingga masyarakat. **Temuan/Hasil:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peranan bappeda dalam koordinasi konvergensi pencegahan stunting di kabupaten gunung mas telah terlaksana dengan baik namun masih belum optimal ditinjau dari pengaruh koordinasi (2) faktor penghambat dalam peranan bappeda dalam koordinasi konvergensi pencegahan stunting di kabupaten gunung mas adalah kurangnya koordinasi antar opd dan adanya refocusing akibat adanya pandemi covid-19 (3) upaya yang telah dilakukan (1) Menetapkan Intervensi Stunting Kedalam IKU Perubahan RPJMD Tahun 2021, (2) Pemberian Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan. **Kesimpulan:** Adapun dari pelaksanaan yang sudah berjalan namun belum optimal karena terdapat faktor penghambat dan terdapat upaya yang dilakukan guna mengatasi faktor penghambat yakni saran yang diberikan yakni (1) Meningkatkan Penyerapan Anggaran yang tersedia, (2) Meningkatkan Pengawasan terhadap Pelaksanaan koordinasi antar OPD, (3) Meningkatkan Kualitas Pelaksana Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan.

Kata Kunci : Peranan, Koordinasi, Leading Sector

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan kumpulan metode dari suatu keputusan dan pelaksanaan program yang telah dirumuskan oleh Badan Perencanaan Nasional (BPN Pusat). Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan diharapkan mampu dianalisa terlebih dahulu serta mampu merangsang peran masyarakat sehingga dapat menggunakan kemampuan sumber daya yang dimiliki. sistem perencanaan pembangunan ini merupakan metode perencanaan pembangunan yang didalamnya terdapat pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang dilaksanakan oleh seluruh unsur pemerintah dengan unsur masyarakat dalam rangka

pengoptimalan kualitas pelaksanaan birokrasi pemerintahan baik di tingkat pusat hingga ke daerah. Dalam hal ini, demi mewujudkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang cerdas, sehat produktif demi tercapainya tujuan pembangunan nasional, maka pemerintah terkhususnya pemerintah pusat membuat regulasi mengenai strategi nasional percepatan penurunan stunting melalui peraturan presiden republik indonesia nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang merupakan merupakan kondisi gagalnya pertumbuhan yang terjadi pada anak-anak baik pada bagian tubuh maupun otak akibat kurangnya asupan gizi yang didapatkannya dalam waktu yang cukup lama. Hal ini sering terjadi pada saat janin masih di dalam kandungan (janin) hingga awal kehidupan dari anak tersebut yakni 1000 HPK (Hari Pertama Kelahiran). Program dan anggaran telah dipersiapkan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam penanganan Stunting. Diharapkan pelaksanaan program itu dapat berjalan sebagaimana mestinya secara konvergen. Kerap kali *ego sectoral* menjadi hambatan dikarenakan masih belum optimalnya perangkat daerah dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas yang tercipta antar organisasi perangkat daerah.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas kini sedang menggalakkan konvergensi program pencegahan Stunting ini, pemerintah daerah bersama Bappedalitbang serta beberapa perangkat daerah yang telah masuk dalam rencana kerja dan anggaran SKPD dalam program penanganan Stunting. Berdasar survei oleh kementerian kesehatan selama 3 tahun terakhir, angka presentasi Stunting Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2018 ini menurut data (Riskesdas) sebesar 38,21%, pada tahun 2019 : 32,83% (SSGBI), pada Tahun 2020 sebesar : 22,87% (ePPGBM). Peranan Bappeda sangat diperlukan dalam intervensi pencegahan stunting mengingat peran Bappeda sebagai *leading sector* diharapkan mampu mengendalikan OPD terkait yang turut serta dalam program ini mampu melaksanakan tugasnya sesuai indikator yang ada dan diharapkan semua perangkat daerah mampu bersinergitas dalam pelaksanaan program tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan mengenai peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam koordinasi konvergensi penegaha stnting di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yakni masih lemahnya beberapa perangkat daerah dalam sinkronisasi perencanaan penganggaran kegiatan penanganan stunting, masih banyak perangkat desa dan kelurahan yang belum mengetahui apa itu stunting, lemahnya koordinasi perangkat daerah dalam penginputan program dan kegiatan dalam penurunan tingkat stunting, dan kader-kader yg ada di desa/kelurahan (kader KPM, Posyandu, Kader BKB, PKK, dan lainnya) masih belum maksimal dalam penanganan stunting.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun konteks penanganan stunting. Penelitian pertama oleh Fahrizannur (2017) dengan judul *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam. perencanaan. pembangunan di daerah Kabupaten. Paser.* Hasil penelitian ini adalah kurangnya kemampuan dari sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam menjalankan fungsi perencanaan pembangunan,

dengan kualitas sumber daya manusia yang kurang berkompeten dalam perencanaan sebuah pembangunan tidak akan terealisasi sebagaimana yang diinginkan. Penelitian kedua oleh Novianto Dwiputra Addi (2016) *Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar*. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana Bappeda melakukan Koordinasi dalam perencanaan Pembangunan ruang terbuka hijau. Penelitian ketiga oleh Alfan Maulana Ishaq (2021) *Studi Literatur Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Pengetahuan Tentang Pencegahan Stunting Pada Kader Posyandu*. Penelitian ini menunjukkan data terdapat 7212 jurnal yang dianalisis tetapi tidak memenuhi kriteria dan tidak sinkron dengan kesehatan, pendidikan, kader posyandu, dan pencegahan stunting. Kemudian dari 20 referensi diperoleh oleh alfan menunjukkan bahwa ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dalam pencegahan stunting oleh kader posyandu. Pendidikan kesehatan ini akan menjadi sebuah proses pembelajaran untuk mengubah pola perilaku agar dapat menjalani kehidupan dengan sehat sehingga mampu mencegah terjadinya stunting. Keempat penelitian oleh Sri Hepti Sutiba Sanjaya (2019) berjudul *Gambaran Kejadian Stunting Pada Balita Di Kota Makassar*. Hasil penelitian ini adalah menggambarkan bahwa mayoritas balita yang stunting memiliki ibu melahirkan di usia 20-35 tahun, ibu berpendidikan rendah, ibu tidak bekerja, keluarga besar, pendapatan keluarga rendah, berjenis kelamin perempuan, berurutan lahir ke-2, berat badan lahir normal, mendapat ASI dari 0-12/24 bulan, mendapat MPASI sejak usia 6 bulan, tidak memiliki riwayat penyakit infeksi, dan imunisasi lengkap. Sehingga diharapkan, petugas kesehatan kedepannya bisa beri informasi terkait gizi seimbang sesuai karakteristik keluarga dan ibu sehingga mudah dipahami. Terakhir penelitian oleh Yuri Agustiani (2020) *Fungsi Koordinasi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Pendidikan Di Kabupaten Aceh Tengah*. Hasil penelitian ini adalah bahwa Fungsi koordinasi yang dimiliki Bappeda dalam pelaksanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah sudah berkoordinasi dengan baik, walaupun belum dikatakan maksimal, hal ini diakibatkan karena koordinasi Bappeda kepada dinas pendidikan masih banyak ditemukan kendala dalam membangun dan merencanakan pembangunan pendidikan, sehingga perlu adanya perhatian dan kebijakan yang dilakukan berdasarkan peraturan atau *qanun* yang sudah ditetapkan, maupun data dan informasi yang detail.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam koordinasi konvergensi penegaha stnting di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni menggunakan pendapat dari Soekanto mengenai teori peranan serta faktor yang mempengaruhi koordinasi oleh Hasibuan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisa sejauh mana peranan Bappeda dalam koordinasi konvergensi dalam pencegahan Stunting di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, beserta faktor penghambatnya serta upaya mengatasi faktor penghambat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun informan penelitian ini terdiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Kepala Bidang Perekonomian Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan Camat Kurun dan Manuhing serta masyarakat Kurun dan Manuhing. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa wawancara semiterstruktur dan terstruktur, observasi partisipatif, serta dokumentasi Adapun analisisnya menggunakan pendapat dari Soekanto mengenai teori peranan serta faktor yang mempengaruhi koordinasi oleh Hasibuan.. Untuk menganalisis teori tersebut digunakan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman yakni, reduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dianalisis peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam koordinasi konvergensi penegaha stnting di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan pengukuran/indikator yakni menggunakan pendapat dari Soekanto mengenai teori peranan serta faktor yang mempengaruhi koordinasi oleh Hasibuan. Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut.

3.1. Hak

a. Anggaran yang tersedia

Bappeda dalam hal ini menggunakan keseterediaan anggaran yang diberikan oleh pusat kepada Tim KP2S (Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting) daerah untuk penanganan Stunting di daerah masing-masing terkhususnya Kabupaten Gunung Mas dan juga dalam pelaksanaan program ini pemerintah Kabupaten Gunung Mas menggunakan APBD daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk penanganan stunting melalui Musrenbang yang dilaksanakan dari tingkat terbawah desa/kelurahan, kecamatan hingga tingkat kabupaten.

b. Pegawai dan penyuluh yang ada di lapangan

Pegawai maupun penyuluh lapangan dalam penanganan Stunting ini telah diatur melalui Perpres 72 tahun 2021 dimana pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membentuk tim KP2S (Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting) dan sekretariatnya berada di bappedalitbang. Tim ini nantinya akan mengkoordinasi seluruh OPD terkait untuk melaksanakan kegiatan penurunan Stunting di Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 1.

Kelompok Penyuluh Stunting di Lapangan

Kecamatan	Kelurahan
<ul style="list-style-type: none">• Tenaga Uptd; Pemilik Paud, Dokter, Ahli Gizi, Penyuluh• Pertanian, Plkb• Pendamping Program Sektoral; Pamsimas, Sanimas,• Pkh, Krpl/P2l, Dll.• Psm• Lsm, Media, Akademisi, Swasta	<ul style="list-style-type: none">• Tp Pkk• Aparat Kelurahan• Pokja & Kader Posyandu• Bidan• Pengelola & Pendidik Paud• Karang Taruna• Rt & Rw• Kelompok Perempuan

<ul style="list-style-type: none"> • Pokjnal Posyandu, Pkg Paud • Asosiasi Profesi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kader
--	---

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022

c. Sarana dan prasarana yang tersedia

Khususnya untuk percepatan penurunan stunting ini, adapun sarana tersebut diantaranya yang telah disiapkan menggunakan sistem aplikasi online pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPBGM) hal ini penting untuk pemenuhan informasi status gizi berdasarkan individu dapat terpenuhi, Aplikasi ini merupakan sistem pencatatan dan pelaporan gizi anak berbasis masyarakat dimana ini bertujuan untuk mendapatkan pendataan yang cepat dan akurat. Adapun yang bertanggung jawab untuk penginputan data Aplikasi e-ppbgm ini adalah Kader Pembangunan Manusia (KPM). Selain aplikasi E-PPBGM dalam pengelolaan data stunting terdapat *website* monitoring Aksi Bangsa Kemendagri yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan daerah, adapun *website* Aksi Bangsa Kemendagri yang bertujuan untuk pengontrolan pelaksanaan 8 aksi Konvergensi pencegahan stunting di seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia. Prasarana akan mendukung pelaksanaan program khususnya dalam memusatkan kegiatan aksi konvergensi sehingga mampu berjalan dengan efektif dan berjalan sesuai target nasional, adapun prasarana yang tersedia di Kabupaten Gunung Mas yang menunjang program konvergensi pencegahan stunting diantaranya terdapat di faskes(fasilitas Kesehatan) dan Gedung rapat diantaranya,

1. Gedung Aula Bappedalitbang sebanyak 1 buah
2. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebanyak 1 buah
3. Puskesmas Rawat Inap sebanyak 6 buah
4. Puskesmas Non Rawat Inap sebanyak 11 buah
5. Puskesmas Pembantu sebanyak 51 buah
6. Poskesdes sebanyak 35 buah

d. Sumber data dan informasi

Sumber data dan informasi penanganan stunting ini diperoleh melalui berbagai *website* dan aplikasi yang telah dipersiapkan oleh pemerintah pusat kepada daerah melalui bappeda untuk dikelola seperti yang telah dijelaskan di atas, yakni aplikasi e-PPBGM dan *website* Aksi Bangsa Kemendagri. Dalam *website* dan aplikasi yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat dibuat untuk memperoleh data dan informasi tingkat dan jumlah stunting di setiap daerah dimana data tersebut dikelola oleh pemerintah daerah dengan menjadi admin setiap daerahnya, dengan hal tersebut dalam menginput seluruh aktivitas maupun data-data maupun informasi penting terkait dengan kegiatan percepatan penurunan stunting

3.2. Kewajiban

a. Satuan tindakan

1. Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Stunting

Aksi Konvergensi merupakan instrumen yang berupa kegiatan yang digunakan dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam konvergensi penanganan penurunan Stunting di

Indonesia. Aksi konvergensi ini sama halnya dengan Aksi Integrasi. Aksi ini dilakukan dalam meningkatkan pendekatan dalam pelaksanaan program kegiatan dan perilaku antar sector agar kegiatan intervensi gizi dapat dilaksanakan, terdapat 8 aksi konvergensi pencegahan stunting yang dilaksanakan bersama dengan integrasi dan sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai penurunan tingkat stunting di daerah. Bappeda memiliki pengaruh yang sangat besar mengingat perannya sebagai *Leading Sector* dalam suksesnya program ini. adapun aksi 1 melaksanakan analisis situasi, melalui rencana kegiatan pada aksi 2, penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD terkait dengan sektor non-pemerintah dan masyarakat melalui rembuk stunting pada aksi 3, Aksi 4 merupakan pembentukan peraturan Bupati/Walikota mengenai Pencegahan Stunting, aksi 5 yakni pembinaan Kader Pembangunan Manusia(KPM), sistem manajemen data intervensi pencegahan dan penurunan stunting aksi 6 pengukuran dan publikasi stunting aksi 7, dan reuiu Kinerja Tahunan pada aksi 8.

2. Coordinator antar OPD

Menindak lanjuti Perpres Nomor 72 Tahun 2021, bahwa dalam intervensi pencegahan stunting, seluruh OPD terkait wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung program prevalensi stunting ini sesuai dengan arahan dari Wakil Presiden khususnya Bappedalitbang sebagai *Leading Sector*. Konvergensi pencegahan stunting ini dilaksanakan oleh tim KP2S (Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting) dengan berkoordinasi dengan OPD daerah dimana tim KP2S ini diketuai oleh Kepala Bappedalitbang pada tahun 2020. Akan tetapi, setelah dikeluarkannya Perpres 72 tahun 2021 ada beberapa perubahan yang terdapat dalam regulasi tersebut dimana saat ini Wakil Bupati menjadi Ketua Tim KP2S dan kepala bappeda dan dinas Kesehatan, akan tetapi Bappedalitbang tetap menjadi *Leading Sector* dalam penanganan ini. Pemerintah daerah juga saat ini sedang menyesuaikan dalam menindaklanjuti Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Karena ini juga terkait dengan status Kabupaten layak anak di Kabupaten Gunung Mas yang sedang kita kerjakan sekarang ini sampai kedepannya.

3. Pemberian dukungan teknis

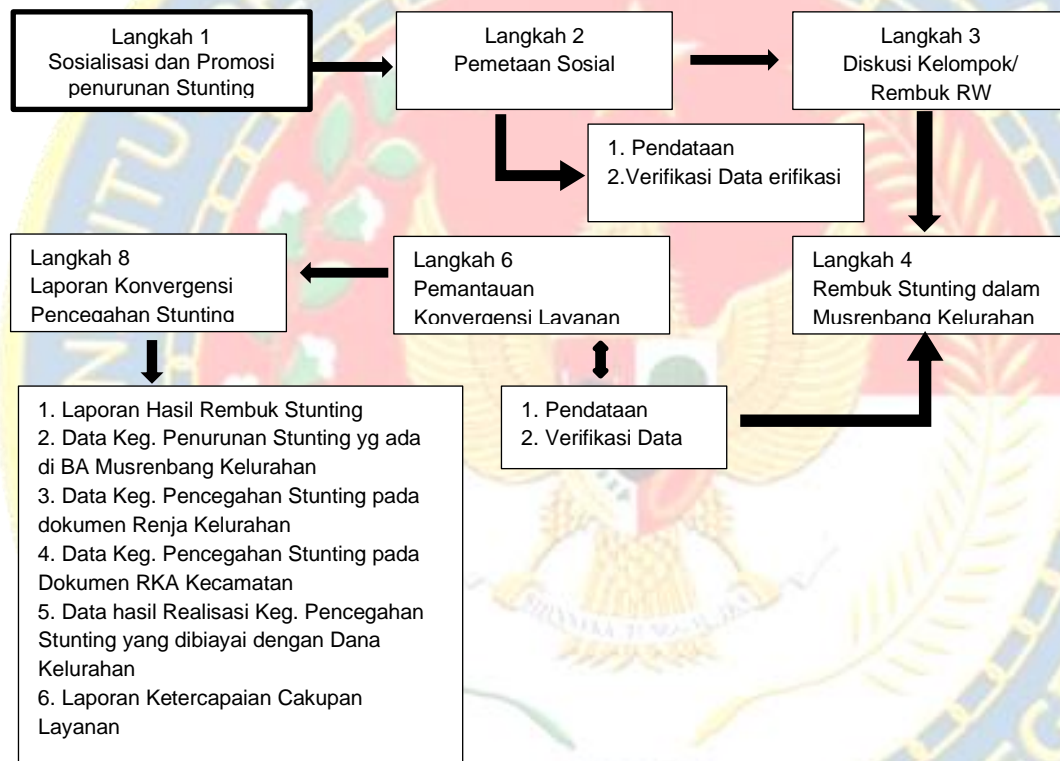
Dukungan teknis merupakan OPD yang telah ditunjuk untuk melaksanakan seluruh kegiatan dan program intervensi yang telah ditetapkan pada aksi 2, pada pembahasan penyelesaian masalah, jika disepakati langkah perbaikannya bersifat teknis, maka OPD dan/atau dinas teknis bersangkutan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jika langkah penanganan masalahnya terkait dengan kebijakan maka Bappeda yang bertanggung jawab melakukan perbaikan dan memberikan arahan perbaikan kebijakan yang diperlukan. badan perencanaan selalu aktif dalam memberikan dukungan teknis intervensi stunting ini, pemerintah daerah bersama dinas kesehatan dan dinas BKKBN melaksanakan kegiatan penyuluhan dalam upaya meningkatkan upaya promotif, edukasi dan sosialisasi bagi ibu-ibu hamil serta pada keluarga yang terus digencarkan sehingga meningkatkan pemahaman untuk pencegahan stunting, dengan melibatkan PKK, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat RT dan RW serta relawan, Upaya penurunan stunting berkaitan dengan program perlindungan sosial, terutama Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan juga pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu.

b. Komunikasi

1. Tercipta komunikasi yang baik

Komunikasi yang baik mampu mempersatukan seluruh pemegang kewenangan yang ada sehingga tercipta sinergitas dan meningkatkan kualitas kinerja yang terjadi di seluruh pemegang kewenangan. Pemerintah daerah bersama dengan bappedalitbang melaksanakan fungsi komunikasi ini melalui koordinasi yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan regulasi yang berlaku

Gambar 1. Langkah Intervensi Stunting



Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Gunung Mas tahun 2022

c. Terjadi koordinasi dan sinkronisasi antar pihak dengan baik dalam penyampaian informasi

Bappeda melalui fungsi koordinasi membagi seluruh program kegiatan terkait stunting kepada seluruh OPD terkait yang ada di Kabupaten Gunung Mas, maka dalam rangka mendukung pelaksanaan program stunting yang dilakukan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2019, telah dikembangkan system basis data yang digunakan untuk mengumpulkan data kegiatan stunting dengan format Microsoft Excell sistem tersebut disebut Master arsip atau Master analisis situasi Itu adalah sebuah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga disitu kita dapat melihat angka-angka dari

beberapa Apa arti dari 14 indikator atau beberapa indikator yang seperti misalnya agak prevalensi Santi dan ibu hamil kekurangan energi kronis remaja perempuan atau remaja putra yang mendapatkan tablet penambah darah kegiatan sanitasi dan kita berkoordinasi dengan bappeda dalam analisis situasi atau aksi pertama itu mengkoordinasikan permasalahan berdasarkan data-data yang telah kita kumpulkan.

d. Pembagian kerja

1. Pembagian tugas sesuai Tugas pokok & fungsi

Karena banyaknya program dan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan konvergensi stunting maka diharapkan seluruh perangkat mengambil bagian-bagian, Bappedalitbang saling berkoordinasi dengan seluruh OPD terkait sehingga mendukung keberhasilan program negara terkait dengan percepatan penurunan stunting. Adapun OPD yang ikut turut dalam percepatan penurunan angka stunting ini diantaranya bappeda sebagai Koordinator pusat, dinkes, dinsos, disdik, dinas p2kbp3a, dinas pertanian, dinas lingkungan hidup, dinas pu, dinas pmd, bappedalitbang, disdukcapil, dinas perikanan, dan dinas ketahanan pangan. Dengan pembagian ini kepala bappeda mengharapkan kerja sama dari seluruh perangkat untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan prosedur yang telah disusun oleh pemerintah pusat yakni aksi 1 sampai dengan aksi 8 di Kabupaten Gunung Mas. Bappeda dalam hal ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan regulasi dan prosedur yang telah ditetapkan.

Tabel 2.

Jenis intervensi Stunting yang telah dilaksanakan di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2021

No	Jenis intervensi	Program/Kegiatan	OPD terkait
1	Leading Sector Penanganan Stunting	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi penganggaran kegiatan percepatan penurunan stunting • Penguatan Koordinasi perencanaan percepatan penurunan stunting • Advokasi penerapan kebijakan percepatan penurunan stunting 	BAPPEDA
2	Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Akses air minum yang aman • Akses sanitasi yang layak • Pembinaan dalam peningkatan status gizi masyarakat • Pembinaan dalam peningkatan pengetahuan gizi masyarakat • Pelaksanaan strategi promosi kesehatan • Peningkatan surveilans Gizi • Penguatan Intervensi suplementasi pada ibu hamil • Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu hamil dan Balita • Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu hamil kurang energi kronis (KEK) • Suplementasi gizi mikro 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Badan Lingkungan Hidup • Dinas PU

		<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dalam peningkatan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan • Pembinaan Pelaksanaan STBM • Layanan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan 	
3	peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Akses pelayanan Keluarga Berencana (KB) • Akses Jaminan Kesehatan (JKN) • Akses bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu (PKH) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas BKK2BN • Dinas Sosial • Dinas p2kbp3a • Dinas PMD • Dinas Kesehatan
4	Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebarluasan informasi melalui berbagai media • Penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi • Kampanye Nasional terkait Stunting • Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua • Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pemantauan tumbuh-kembang anak • Penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja • Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Disdukcapil • Dinas p2kbp3a • Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
5	Peningkatan akses pangan bergizi	<ul style="list-style-type: none"> • Akses bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu • Pemasaran dan promosi hasil perikanan • Akses kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PMD • Dinas perikanan & ketahanan pangan

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Gunung Mas tahun 2022

e. Disiplin

1. Sasaran target penurunan tingkat presentase Stunting

Sasaran target merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung dan memberi arah tujuan program dan kegiatan, hal ini pun yang telah diterapkan pemerintah pusat terhadap konvergensi penurunan stunting ini, berdasarkan arahan dari wakil presiden ia menyampaikan kepada seluruh

pemangku kepentingan untuk dapat berkomitmen dalam upaya percepatan penurunan *stunting*. Berdasarkan elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), capaian prevalensi stunting di Kabupaten Gumas tahun 2020 yakni 22,87 persen, dan tahun 2021 ada pada angka 20,16 persen. Ini menunjukkan terjadi penurunan 2,71 persen, dalam penilaian.

Tabel 3.

Hasil Analisis Pengukuran Data Stunting di Kabupaten Gunung Mas tahun 2021

No.	Tahun	Data Stunting						Status Stunting	
		Jml Sasaran Balita	Sgt Pendek	Pendek	Normal	Tinggi	Stunting	%	Status
1.	2020	10,530	645	1,460	7,007	94	22,87	-2,70	Turun
2.	2021	10,733	428	1076	5919	36	20,16		

Sumber : Data e-PPGBM 2020 e-PPGBM 2021 Tahun 2022

2. Melaksanakan tugas sesuai prosedur dan regulasi

Pemerintah Pusat juga telah menunjukkan komitmen yang sangat tinggi dalam upaya percepatan penurunan stunting ini yaitu dengan memperkuat regulasi sehingga pada tanggal 5 Agustus 2021 yang lalu telah terbit Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang isinya berupa penjabaran strategi nasional percepatan penurunan stunting. Kinerja OPD adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan, dengan kegiatan manajemen ini khususnya dapat membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. OPD saat ini masih belum optimal akibat beberapa hambatan yang terjadi di lapangan, program dan kegiatan yang disusun sudah cukup baik akan tetapi fakta dilapangan dalam pelaksanaan tidak berjalan dengan efektif.

3.3. Hambatan dalam pelaksanaan koordinasi Bappedalitbang dalam pencegahan Stunting di Kabupaten Gunung Mas

a. Adanya refocusing anggaran

Terjadinya refocusing anggaran besar-besaran akibat adanya pandemi covid-19 sangat berpengaruh terhadap seluruh pelaksanaan birokrasi pemerintahan, seluruh pemerintahan daerah harus memutar otak untuk pengefisiensi anggaran atas program dan kegiatan yang akan dijalankan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan arah kebijakan keuangan terbaru dengan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya. Hal itu membuat OPD terkait tidak maksimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam upaya konvergensi stunting yang ingin diwujudkan oleh pemerintah

b. Kurangnya koordinasi dalam penyampaian informasi dan data

Pengelolaan informasi dan data dalam pelaksanaan koordinasi konvergensi stunting di kabupaten Gunung Mas di nilai sudah cukup baik, hanya saja ada Sebagian OPD tertentu yang masih terlambat dalam memberikan data dan informasi kepada Bappedalitbang. Salah satunya adalah keterlambatan pada pelaksanaan program 8 aksi terdapat OPD terkait yang terlambat bahkan tidak mengikuti kegiatan tersebut, sehingga hal ini mempersulit OPD-OPD yang telah hadir yang membutuhkan data dan informasi dari OPD tersebut.

3.4. Upaya Yang Dilakukan yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan dalam Peranan Bappedalitbang dalam Koordinasi Pencegahan Stunting di Kabupaten Gunung Mas

a. Menetapkan Intervensi Stunting ke dalam IKU Perubahan RPJMD Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan. IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Refocusing anggaran ini merupakan akibat dari pendanaan program prioritas penanganan Covid-19 tahun 2020 yang akan berlanjut hingga tahun 2021 membuat pendanaan bagi program dan kegiatan menjadi terhambat, terkhususnya penanganan stunting. Maka dari itu, agar program pencegahan Stunting dan program yang lain tidak terhambat akibat refocusing anggaran untuk penanganan *covid-19*, pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas melakukan perubahan RPJMD yang dilaksanakan pada juni 2021 dimana untuk program prioritas yang memang harus tetap dilaksanakan tetap masuk ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) pada perubahan RPJMD terbaru

b. Pemberian Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan

Tercapainya target penurunan stunting ini berasal dari sinergitas seluruh Organisasi Perangkat Daerah dengan partisipasi yang aktif dari seluruh komponen yang telah dipercaya, adapun cara yang telah dipersiapkan oleh Bappedalitbang dibalik itu instansi ini memiliki tanggung jawab sebagai *Leading sector* atas keberhasilan dari program ini bappedalitbang telah memberikan sosialisasi kepada seluruh pemegang wewenang berupa penguatan regulasi terbaru yang telah terbit yakni Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sosialisasi Juknis Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Integritas di Kabupaten/Kota yang telah disiapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian.

Stunting merupakan kondisi gagalnya pertumbuhan yang terjadi pada anak-anak seperti halnya dalam penelitian Sri Hepti Sutiba Sanjaya (2019) dimana stunting terjadi mayoritas balita yang ibunya melahirkan di usia 20-35 tahun yang latar belakang keluarganya berpendidikan serta berpenghasilan rendah. Stunting sendiri mempengaruhi baik pada bagian tubuh maupun otak akibat kurangnya asupan gizi yang didapatkannya dalam waktu yang cukup lama. Stunting saat ini banyak terjadi di seluruh Indonesia. Latar belakang terjadinya stunting yakni dapat terlihat dari faktor perekonomian keluarga dan pola asuh yang tidak baik juga akan mempengaruhi asupan gizi yang diberikan kepada anak bahkan ibu yang di masa remajanya tidak mendapatkan nutrisi yang cukup bahkan di masa kehamilan ibu juga akan mempengaruhi perkembangan janin sehingga anak yang dilahirkan akan terkena stunting. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai instansi

yang diberi kewenangan untuk mengurus permasalahan terkait stunting yang terjadi di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini BAPPEDA Kabupaten Gunung Mas bersama instansi lainnya bersama-sama seperti dalam penelitian Novianto Dwiputra Addi (2016) menangani terkait stunting yang telah banyak terjadi di Kabupaten Gunung Mas sedangkan penelitian tersebut tentang Koordinasi dalam perencanaan Pembangunan ruang terbuka hijau.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah stunting di Kabupaten Gunung Mas salah satunya dengan konvergensi pencegahan stunting lewat program 8 aksi. Program tersebut sangat kompleks mulai dari perencanaan hingga tahap akhir dalam penanganan stunting telah lengkap tertera dan diimplementasikan dalam program tersebut. Diperlukan kerjasama antar lini dalam pencegahan stunting ini dimana BAPPEDA beserta tim melakukan sosialisasi maupun penyuluhan-penyuluhan kepada setiap masyarakat di Kabupaten Gunung Mas sama halnya dengan penelitian Alfian Maulana Ishaq (2021) namun hasilnya berbeda karena pencegaha lewat kader Posyandu tidak memenuhi kriteria dalam memberikan pendidikan kesehatan terhadap permasalahan stunting yang mana dari sebelumnya bertujuan agar masyarakat bisa paham tentang apa itu stunting bagaimana gejalanya serta pencegahannya seperti halnya dalam penelitian Fahrizannur (2017) dimana dalam ini SDM yang juga sangat penting memberikan peranan lebih terhadap berjalannya suatu program di BAPPEDA Kabupaten Paser serta Kabupaten Gunung Mas.

Dalam berjalannya konvergensi pencegaha stunting ini khususnya di Kabupaten Gunung Mas walau telah berjalan dengan baik namun ada pula hambatan yang terjadi sama halnya dalam peneitian Yuri Agustiani (2020) dimana pelaksanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah sudah berkoordinasi dengan baik, walaupun belum dikatakan maksimal, hal ini diakibatkan karena koordinasi Bappeda kepada dinas pendidikan masih banyak ditemukan kendala dalam membangun dan merencanakan pembangunan pendidikan. Untuk pencegaha stunting sendiri kendala yang didapatkan yakni anggaran yangm masih kurang serta kurangnya juga koordinasi yang sebetulnya ini poin penting yang harus dilaksanakan. Karena jika mengandalkan BAPPEDA saja tidak akan bisa berjalan program ini. Dengan adanya program ini diharapkan kedepannya presentase stunting dapat terus menurun dan dapat melahirkan generasi muda yang sehat, cerdas dan pintar.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan peranan Bappedalitbang dalam Koordinasi Konvergensi Pencegahan Stunting Di Kabupaten Gunung Mas secara keseluruhan belum berjalan dengan baik dan memuaskan, ada beberapa kekurangan yang terjadi pada saat pelaksanaannya, dari dua dimensi yang ada terdapat satu hambatan di setiap dimensi/indikator tersebut, diantaranya pada Dimensi Hak di Sub Dimensi Anggaran yang tersedia dan Dimensi Kewajiban di Sub Dimensi Komunikasi. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi Peranan Bappedalitbang dalam koordinasi konvergensi pencegahan Stunting diantaranya, anggaran yang tersedia masih belum kurang optimal akibat adanya refocusing anggaran akibat pengalihan anggaran untuk program penanganan covid-19 dan kurangnya koordinasi antar pihak dengan baik dalam penyampaian data dan informasi akibat banyaknya rolling jabatan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bappedalitbang Kabupaten Gunung Mas dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut diantaranya menetapkan

Intervensi Stunting Kedalam IKU Perubahan RPJMD Tahun 2021 dan pemberian Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat dari Soekanto mengenai teori peranan serta faktor yang mempengaruhi koordinasi oleh Hasibuan.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa mengenai peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam koordinasi konvergensi penegaha stnting di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, serta Camat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin, Burhan. (2011). *Sosiologi komunikasi: teori, paradigma, dan diskursus teknologi komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Silalahi, Ulber. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
https://siha.kemkes.go.id/portal/files_upload/Buku_Saku_Stunting_Desa.pdf diakses pada minggu, 29 agustus 2021 13.18

<https://www.kemkes.go.id/article/view/18052800006/ini-penyebab-stunting-pada-anak.html> diakses pada sabtu, 28 Agustus 2021, 14.04